

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Kehidupan politik di Australia bersifat kompetitif, konfrontatif dan penuh pertentangan dalam gaya, pragmatis dalam perumusan ide-ide dan kebijakan dan partisipasi. Sistem politik Australia dapat digolongkan sebagai sistem politik barat, dengan parlementer dan demokratis. Tujuh pemerintahan yaitu satu federal dan enam negara bagian kecuali satu, mempunyai parlemen bikameral yang dipilih oleh rakyat secara berkala atas dasar hak pilih universal. Lembaga eksekutif dibentuk berdasarkan komposisi badan legislatif dan bertanggung jawab terhadap badan tersebut.

Parlemen Australia didominasi oleh persaingan antara dua partai politik utama. Meskipun demikian, kehidupan politik Australia telah menghasilkan ciri-ciri khusus, yang didasarkan sebagian atas percampuran antara lembaga-lembaga dan tradisi Inggris (dimana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen) dengan struktur federal yang diilhami oleh Amerika Serikat, dimana negara-negara bagian tetap memiliki otonomi secara konstitusional dan, pada tingkat federal, diwakili oleh sebuah majelis yang dipilih secara langsung (senat). Melalui dua warisan politik inilah, kemudian muncul dua sistem pengaturan konstitusional.

Rakyat atau masyarakat Australia adalah orang-orang yang berpaham demokrasi yang berdasarkan pemilihan umum. Walaupun terdapat kelemahan-

kelemahan dalam parlemen, kekurangan dalam kehidupan politik sehari-hari, dan ketidaksamaan dalam sistem pemilihan umum itu sendiri, legitimasi dan kekuasaan politik bersumber dari kotak suara dalam pemilihan umum. Paham demokrasi berdasarkan pemilihan umum tidak hanya terbatas pada bidang pemerintahan, tetapi juga dapat ditemui dalam ribuan organisasi sukarela, termasuk partai politik di seluruh Australia. Demokrasi berdasarkan pemilihan umum adalah proses politik yang disadari oleh semua masyarakat di Australia dimana hampir seluruhnya ikut serta didalamnya.¹ Masyarakat Australia memang menganut paham egaliterisme sosial yang memandang adanya suatu persamaan hak didalamnya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kelas tetap ada meskipun tidak tampak jelas. Hal ini ditunjukkan pada pemerataan dukungan kelas terutama dari kelas menengah yang asal mulanya mendukung Partai Liberal Australia.

Legitimasi politik yang dihasilkan oleh pemilihan umum berkaitan erat dengan pandangan mengenai pemilihan umum yang bersaing yaitu melalui bagaimana rakyat memilih partai politiknya, alasan yang membuat rakyat untuk memilih partai tersebut, atau koalisi partai-partai politik yang akan membentuk pemerintahan. Paham demokrasi Australia didasarkan atas persaingan dalam pemilihan umum dimana terdapat adanya pilihan diantara berbagai alternatif, dan yang paling penting adalah terdapat kemampuan bersama untuk mengganti pemerintahan.²

¹ Don Atkin, "Australian Politic Culture", *Australian Cultural History*, No. 5, 1986, hal. 6

² Para pemilih memilih calon-calon individual bagi parlemen, tetapi berhubung para pejabat lembaga eksekutif berasal dari parlemen, maka suara para pemilih secara kolektif menentukan

Terdapat suatu indikasi bahwa bila pihak oposisi lemah, yaitu dirasakan tidak adanya alternatif yang sebenarnya, sistem politik menjadi kurang demokratis dan akhirnya pemerintah menjadi kurang efektif. Sebuah oposisi yang kuat akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. Sebaliknya jika oposisi lemah, maka kesempatan terjadinya perubahan dalam pemerintahan untuk menjadi lebih baik akan menjadi relatif kecil. Pihak oposisi yang difokuskan yaitu adalah kabinet bayangan yang ada dalam pemerintahan federal Australia serta keberadaannya dalam penyeimbangan pemerintahan Australia dimana keikutsertaannya memberikan suatu ciri khas pemerintahan Australia.

Kebijakan-kebijakan publik dalam pemerintahan Australia cenderung didasari oleh peranan partai politik dalam pemerintahan. Dalam suatu periode pemerintahan, partai politik yang menang secara otomatis memegang sebagian besar pemerintahan Australia. Namun demikian, kondisi demokratis tercipta ketika partai oposisi yang kalah dalam pemilihan umum, tetap memiliki suatu bagian yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan terutama untuk menilai berbagai kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

B. TUJUAN PENULISAN

Salah satu faktor penting dalam kehidupan politik khususnya pada pemilu di Australia adalah peranan dari pemerintah sebelumnya atau lemahnya pihak oposisi. John Howard, sebagai kepala pemerintahan yang akhirnya terpilih kembali pada pemilu 2004 lalu, tidak begitu saja terpilih dengan mudah karena

partai politik yang akan membentuk pemerintahan. Chauvel H. Richard, *Budaya dan Politik Australia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.

disisi lain terdapat suatu oposisi yang mencoba untuk mengambil alih pemerintahan melalui pemilihan umum. Mark Latham sebagai pemimpin Partai Buruh dengan jajaran kabinet bayangannya di Australia memiliki berbagai pandangan yang tidak jarang bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan John Howard beserta kabinet federalnya.

Dalam beberapa kajian, Latham sebagai pihak oposisi pada Pemilu 2004 lalu, memiliki perbedaan yang terkadang sangat berlawanan. Fenomena tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan sering dijadikan kajian politik bagi para pengamat maupun pelaku politik. Dalam pemerintahan Australia, pihak oposisi tetap mendapatkan bagian dalam pemerintahan sebagai suatu kabinet yang disebut sebagai kabinet bayangan atau *Shadow Ministry*. Kabinet bayangan memiliki hak untuk memberikan suatu opini dan kebijakan publik bagi pemerintah dan masyarakat Australia yang menambah kondisi demokratis di Australia. Oleh karena itu, untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah Australia melalui dua Partai yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh, maka dibuatlah tulisan ini.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Australia merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Hak dan kebebasan individu dalam berpolitik sangat dijunjung tinggi. Terlebih lagi dengan adanya tingkat antusias masyarakat terhadap pemilihan umum sebagai salah satu unsur demokrasi dinilai cukup tinggi. Tidak seperti kebanyakan negara-negara lain yang menganut paham demokrasi yang berasal dari pengaruh eksternal, Australia muncul sebagai negara yang menganut paham

demokrasi sebagai akibat dari perkembangan politik internal meskipun isu-isu luar negeri sering dijadikan sebagai isu kampanye dalam pemilihan umum. Australia mempunyai gaya politik pragmatis, dengan persaingan tokoh dan partai politik yang berkonfrontasi dan partisipasi yang pluralis.³ Sistem parlementer telah mewarnai kehidupan politik Australia yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Inggris sebelumnya yang dipadukan oleh sistem pemerintahan federal Amerika Serikat. Meskipun begitu, perkembangan politik internal di Australia melalui persaingan partai politik di Australia lebih menjadi suatu akibat dari terciptanya kondisi demokratis di Australia. Kesadaran masyarakat terhadap perkembangan politik di Australia ditandai dengan keikutsertaan masyarakat Australia dalam pemilihan umum sebagai salah satu unsur demokrasi. Partai politik muncul sebagai suatu wadah atau tempat dimana masyarakat dapat mencurahkan keninginannya dan mewujudkan kepentingannya dalam kehidupan politik di Australia.

Sistem politik Australia dapat digolongkan sebagai sistem politik barat, parlementer dan demokratis. Tujuh pemerintahan yaitu satu federal dan enam negara bagian kecuali satu, mempunyai parlemen bikameral yang dipilih oleh rakyat secara berkala atas dasar hak pilih universal. Kehidupan politik di parlemen didominasi oleh dua persaingan partai politik utama yaitu Labor party (Partai Buruh) dan Liberal-National Party Coalition (Partai Liberal).⁴ Kedua partai tersebut, secara tradisional berada dalam struktur sosial (kelas).

³ Ibid.

⁴ Kelompok liberal telah menggunakan tiga nama bagi organisasi yang pada dasarnya sama— Liberal Party 1909-1916, National Australia Party 1916-1931, United Australia Party 1931-1944, Liberal

Partai Buruh merupakan partai bagi para kaum pekerja atau buruh, sedangkan kelompok Konservatif-Liberal didukung oleh kelompok kelas menengah dan atas. Adapun kelompok Konservatif-Nasionalis lebih mewakili kalangan petani atau pemilik lahan. Namun dalam perkembangannya, batasan semacam ini semakin kabur, dan kelompok pemilih kelas menengah di Australia tidak lagi secara khusus menegaskan sikap loyal mereka terhadap partai politik tertentu. Partai-partai politik harus berusaha tidak kehilangan dukungan dari kelompok kelas menengah bila ingin memegang tampuk kekuasaan pemerintahan, dan karenanya hampir tidak terdapat perbedaan mendasar pada kebijakan antara satu partai dengan partai yang lainnya.⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan komposisi kelas pendukung partai politik antara lain adalah adanya suatu fenomena yang dinamakan *embourgeoisment* (semakin membaiknya tingkat kehidupan) dikalangan kaum buruh dan semakin meningkatnya jumlah kaum wanita sebagai tenaga kerja.

Labor Party (Partai Buruh) sebagai partai tertua di Australia yang didirikan pada tahun 1890, pada awalnya merupakan suatu perkumpulan serikat pekerja yang memperjuangkan kepentingannya dengan menaruh wakil-wakil rakyatnya di parlemen yang kemudian dianggap mewakili kelas buruh dengan adanya gerakan kaum buruh sebelumnya. Tidak seperti sebagian besar partai lain, dulu maupun

⁵ Australian Politics.com (<http://www.australianpolitics.com/>) partai politik di Australia dan "Australian Political Facts", oleh Ian McAllister, Malcolm Mackerras and Carolyn Brown Boldiston.

sekarang, Partai Buruh didirikan oleh sebuah organisasi diluar parlemen untuk dijadikan “sayap politik” organisasi tersebut.

Keinginan dari gerakan serikat pekerja untuk menguasai wakil-wakilnya di parlemen memberikan ciri khusus bagi Partai Buruh, yaitu peranan organisasi ekstra parlementer dalam merumuskan kebijaksanaan partai dan disiplin yang dikenakan bagi anggota-anggota parlemen melalui sumpah partai dan sistem *Caucus*. Para anggota bersumpah bahwa mereka akan mematuhi ketentuan dan rencana kerja partai dan, apabila terpilih untuk parlemen, mereka akan memberikan suara sesuai dengan keputusan mayoritas *Caucus*. *Caucus* terdiri dari semua anggota parlemen sebuah partai politik yang mengadakan rapat untuk menentukan kebijaksanaan dalam parlemen.

Kelas menengah yang pada awalnya identik dengan partai liberal, mulai memberikan dukungan kepada Partai Buruh yang dicerminkan dengan komposisi sosial dari keanggotaannya dan, terutama wakil-wakilnya di parlemen. Para pejabat serikat buruh yang lama telah digantikan oleh para politisi profesional dengan berpendidikan universitas. Gough Withlam yang merupakan seorang pengacara, menjadi lambang pergantian pimpinan Partai Buruh yang terus berlangsung dibawah pimpinan Bob Hawke. Dalam hal pendidikan, walaupun tidak dalam hal latar belakang sosial, anggota-anggota parlemen dari Partai Buruh menyerupai anggota-anggota parlemen Partai Liberal.

Partai Buruh merupakan partai politik satu-satunya yang terus menerus meraih suara di House of Representatives (majelis rendah) sejak tahun 1901. Sepanjang abad 20, Partai Buruh mengalami tiga kali perpecahan yang

melemahkan posisinya dalam kancah politik Australia. Partai ini memegang kekuasaan Pemerintahan Federal selama sepertiga masa sejak terbentuknya Federasi Australia seratus tahun yang lalu. Partai Buruh dianggap sebagai sebuah partai sosialis demokratis yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi secara demokratis terhadap sektor industri, produksi dan tukar menukar untuk menghapuskan penghisapan.

Partai Liberal pada awalnya dibentuk dari penggabungan kalangan Proteksionis dan partai-partai perdagangan bebas pada tahun 1910. Partai ini muncul dan mulai menonjol sebagai reaksi terhadap munculnya Labor Party (Partai Buruh). Para aktivis partai ini dan anggota parlemen liberal sebagian besar didominasi oleh kelas menengah atas, beragama Protestan, dan memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah maupun universitas swasta. Partai yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Robert Menzies (Perdana Menteri terlama dalam sejarah Australia) ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang klimaksnya terjadi pada dewasa ini. Menzies menjabat Ketua Umum partai ini sejak 1944 hingga 1966 dan menjabat Perdana Menteri Australia selama tiga periode. Partai Liberal berkuasa dan menjalankan pemerintahan dengan koalisinya, Partai Nasional selama 35 tahun sejak 51 tahun terakhir.⁶ Prinsip ideologi Partai Liberal terlihat di dalam pamflet yang berjudul "What Liberals stands For". Di dalam pamphlet tersebut banyak memberikan pernyataan-pernyataan umum dan filosofis

⁶ ABC Public Record; (<http://www.abc.net.au/public/>)

yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terperinci agar dapat di laksanakan. Isi dari pamflet tersebut antara lain :⁷

1. Kaum Liberal percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat melalui sistem parlementer, di mana wakil-wakil yang terpilih oleh rakyat adalah bebas bertindak atas dasar keyakinan mereka sendiri ;
2. Masyarakat Liberal merupakan asosiasi bebas antara individu yang percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk membangun kepribadiannya sendiri dan memilih cara hidupnya sendiri ; dan
3. Kaum Liberal bertujuan menciptakan lingkungan di mana prakarsa individu dan perusahaan swasta tumbuh dengan subur. Mereka mengakui bahwa perekonomian pasar bebas adalah faktor utama untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Selain pamflet “What Liberals stands for”, sub komite filosofi 1977 dan 1980 mengeluarkan selebaran yang berjudul “Liberal Thinking”, dan filosofi Liberal yang dirancang Menzies pada 1965. selebaran Liberal thinking misalnya, menyatakan, “menciptakan platform pada prinsipnya, bukan secara eksklusif, adalah tugas organisasi partai; pembentukan kebijakan pada prinsipnya adalah

⁷ David Solomon, *Australia's Government and Parliament* (Edisi ke-7 : Melbourne : Nelson, 1998), hal. 118, dalam Zulkifli Hamid, *op cit.*, hal. 229

tugas anggota parlemen partai, yang berpedoman pada saran dari organisasi ; dan badan resmi dalam partai bertugas untuk menyatakan filosofi partai.⁸

Ketika memperingati 21 tahun Partai Liberal modern, Menzies mengatakan tentang filosofi Partai Liberal yang berbunyi :⁹

“kita telah mengkaji bahwa jawaban yang benar adalah menetapkan kebebasan individu, untuk mencapai persamaan kesempatan, melindungi individu melawan penindasan, menciptakan mesyarakat di mana hal-hak dan tanggung jawab diakui dan menjadi efektif. Dalam masyarakat yang bebas ini, gagasan bersifat tirani dari sebuah Negara yang menguasai seluruhnya harus ditolak, berikut dokma-dokma sosialismenya.”

Program kerja Partai Liberal biasanya dari pernyataan-pernyataan yang mengandung kata-kata “percaya pada” dan “dengan prinsip” tanpa menjelaskan arti yang dimaksud. Juga terdapat banyak pengulangan tema. Partai ini menaruh perhatian terhadap hak-hak individual dan perlindungan atas hak-hak tersebut dan kebebasan dari ancaman yang berasal dari negara. Partai ini juga bertujuan menumbuhkan kemampuan dan kegiatan individual sebagai basis untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Penekanan pada kebebasan berusaha dan kemerdekaan individual digabungkan dengan tekadnya untuk menciptakan keadilan social-ekonomi dan persamaan kesempatan yang bebas dari hak-hak istimewa kelas-kelas social tertentu.

⁸ Dean Jaensch (a), *The Liberal Party*, dalam Dennis Woodward, Andrew Parkin dan John Summers (Eds), *Government, Politics and Power in Australia* (Edisi ke-3: Melbourne : Longman Cheshire, 1987), hal. 138, dalam Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hal. 230

⁹ Dean Jaensch (a), *The Liberal...Ibid.*, hal. 148 dalam Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hal. 231

Tabel 1.1
Perbandingan Sumber Dukungan Partai, 1968-72

Kelompok Profesi	Jumlah Dukungan	
	Koalisi L- N %	Buruh %
Profesional	54	28
Manager	65	21
Pengusaha Kecil	56	28
Karyawan	48	35
Buruh terampil	35	50
Buruh semi terampil	30	56
Buruh kasar	23	62
Pemilik kebun/ternak	70	16
Buruh kebun/ternak	43	41
Rata-rata dukungan	43	41

Sumber : David Solomon, *Australia's Government and Parliament* (Edisi Ke-7; Melbourne: Nelson, 1988), hal.125

Salah satu implikasi dari rencana kerja Partai Liberal adalah menginginkan peranan negara yang semakin kecil dalam pengelolaan ekonomi dan dunia usaha dan adanya keinginan untuk membatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan negara terhadap hak-hak individual. Dalam prakteknya, partai ini mempunyai pandangan yang sama dengan partai buruh tentang pengelolaan ekonomi campuran model Keynes dan pengembangan pengaturan-pengaturan kesejahteraan yang lebih luas. Partai ini mau menerima pandangan masyarakat Australia sejak lama tentang peranan penting yang dimainkan dalam pembangunan nasional, dan ia telah berusaha untuk menggunakan negara sebagai sebuah kekuasaan bersama guna melayani hak-hak individual.

Tujuan-tujuan yang ingin di capai Partai Liberal, sebagaimana yang tertuang di dalam anggran dasar, antara lain :¹⁰

1. Sebuah parlemen mengawasi eksekutif dan UU mengawasi semua.
2. Independensi badan peradilan.
3. Kebebasan berbicara, beragama dan berserikat.
4. Kebebasan warganegara untuk memilih cara hidup dan kehidupannya, tetapi menjadi subjek terhadap hak-hak orang lainnya.
5. Melindungi rakyat demi eksploitasi.
6. Mengutamakan dorongan kepada prakarsa dan perusahaan-perusahaan sebagai kekuatan dinamis bagi perkembangan.

Akhir-akhir ini telah terjadi saling pendekatan antara Partai Buruh dengan Partai Liberal karena keduanya menetapkan kebijakan yang sangat mirip. Keduanya berusaha untuk mengambil kebijakan yang pragmatis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik. Dalam prakteknya, Partai Liberal juga sependapat dengan Partai Buruh bahwa negara mau tidak mau harus memainkan peranan penting dalam masalah perekonomian.

Disamping itu, Australia merupakan negara yang berpemerintahan perwakilan dan bertanggung jawab, Australia juga mempunyai program kesejahteraan dan perekonomian campuran dimana intervensi pemerintah untuk melindungi yang lemah diperlunak untuk tidak mencampuri hak-hak kepemilikan.

¹⁰ Jaensch (a), *The Liberal...Ibid.*, hal 147, dalam Zulkifli Hamid, *op cit*, hal 232

Pembangunan ekonomi Australia dapat dikatakan pesat meskipun masih tergolong kurang merata. Pesatnya pembangunan ekonomi tersebut ditunjukkan dari bagaimana Australia dapat bangkit dari dua kali krisis ekonomi pada tahun 1930-an dan tahun 1980-an.

Terlepas dari sejarah politik serta perjalanan dua partai politik yang dominan di Australia tersebut, pemilihan umum Australia tergolong dalam salah satu pemilihan umum yang demokratis dimulai pada pemilihan umum pertama Australia hingga pada pemilihan umum 2004 yang lalu. Kemenangan Howard sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum 2001, sangat berpengaruh pada pemilihan umum 2004 lalu. Dengan berbagai kebijakan baik dalam maupun luar negeri-nya, Howard memperoleh berbagai dukungan baik dari dalam maupun luar negeri yang menginginkan Howard untuk tetap memegang kunci pemerintahan Australia pada periode selanjutnya. Kemenangan Howard yang memimpin Partai Liberal secara berturut-turut ini tentu saja tidak lepas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya melalui kabinet yang dibentuknya terlepas dari kesuksesannya dalam setiap kampanye yang dilancarkannya. Isu-isu baik dalam maupun luar negeri yang diangkat tentu saja berpengaruh pada kampanye yang dilancarkannya disamping berbagai faktor lainnya.

Disisi lain, pihak oposisi yang dalam hal ini diperankan oleh mark latham dari partai buruh serta keberadaan “Shadow Ministry” yang berasal dari partai oposisi yang berperan sebagai pihak yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah federal Australia memiliki suatu warna tersendiri dalam Pemilu Australia yang lalu. Kabinet bayangan atau shadow ministry merupakan suatu

kabinet yang dibentuk oleh partai oposisi yang memiliki tugas untuk mengawasi tugas rekan sejawatnya dalam kabinet federal. Tidak jarang timbul perbedaan pandangan mengenai suatu kebijakan politik yang dilancarkan oleh kabinet bayangan kepada kabinet federal Australia. Dengan demikian, keseimbangan pemerintahan sangat tampak dalam kehidupan politik di Australia yaitu dengan adanya pihak oposisi dalam pemerintahan yang berupa kabinet bayangan yang juga menegaskan bahwa Australia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis.

Tabel 1.2

Hasil polling bulan Juli-Agustus 2004

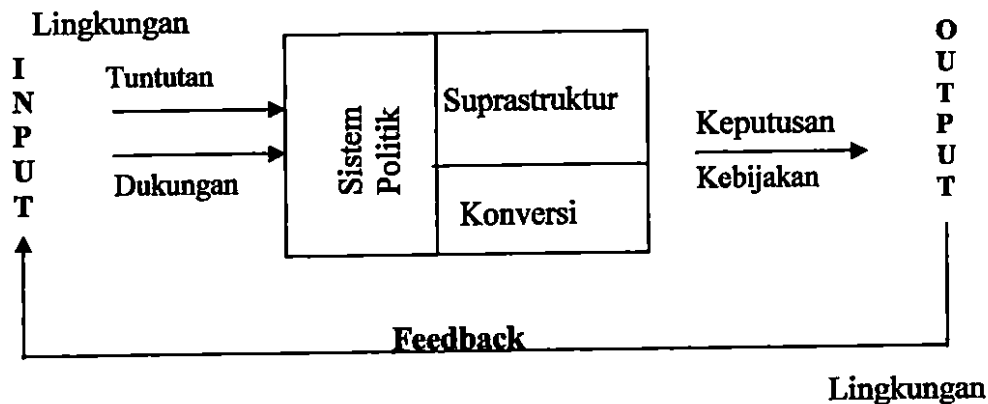
Partai	Aug. 2004	Jul. 2004
Australian Labour Party	53.5%	53%
Coalition (Liberal / National)	46.5%	47%

Sumber: Roy Morgan, Research Methodology: Face-to-face interviews to 1,909 Australian voters, conducted on Jul. 31 and Aug. 1, and Aug. 7 and Aug. 8, 2004. No margin of error was provided.

secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang dapat diamati.¹² Dengan demikian, diambilah suatu teori yang terkait dalam melakukan penelitian, yaitu :

Analisis Sistem Politik (David Easton)

Bagan 1.1



Sumber : Mohtar Mas' oed dan Colin Mac Andrews, (Eds), *Perbandingan Sistem*

Politik, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1989). h.5

Sistem politik sebagai bagian dari sebuah sistem umum juga memenuhi ciri-ciri tersebut. Dalam sebuah sistem politik juga terdapat beberapa elemen politik. Elemen-elemen politik itu saling berhubungan satu sama lain dalam struktur tertentu. Struktur-struktur politik itu kemudian membentuk fungsinya

¹² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal. 61.

masing-masing. Dalam suatu sistem politik, terdapat dua struktur utama, yakni infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur akan menjalankan fungsi input dan suprastruktur menjalankan fungsi output. Proses hubungan antara input dan output ini kemudian menjadi salah satu ciri sistem politik.

Dalam wacana sistem politik, infrastruktur yang menjalankan fungsi output yang diwakili oleh kelompok masyarakat yang bukan pemerintah (non government). Ini berarti dapat diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti partai politik, organisasi masa, kelompok-kelompok kepentingan dan bahkan juga individu yang memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang politik. Suprastruktur yang menjalankan fungsi output diwakili oleh badan-badan pemerintah dalam bentuk dan skala yang berbeda. Lembaga-lembaga yang dapat digolongkan kedalam suprastruktur adalah perdana menteri dan jajarannya, DPR atau Parlemen, Badan-badan Yudisial dan lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam pengambilan keputusan yang lebih orientatif.

Dalam kaitannya dengan suprastruktur dan infrastruktur, perlu dibedakan antara individu sebagai anggota atau fungsionaris partai politik dan sebagai anggota atau pimpinan lembaga eksekutif dan yudisial. Jika seseorang berbicara atas nama fungsionaris parpol, maka ia dapat digolongkan sebagai infrastruktur. Namun, jika seseorang yang sama berbicara sebagai fraksi di Parlemen, maka ia berbicara sebagai suprastruktur.

Proses sistem politik dapat dimulai dari adanya input yang dijalankan infrastruktur. Input ini dapat berupa tuntutan-tuntutan (*demands*) dan dukungan-dukungan (*supports*). Tuntutan adalah beberapa keinginan yang muncul dari

masyarakat yang diharapkan dapat direspon oleh pemerintah. Sedangkan dukungan biasanya dapat berupa sikap dari masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tuntutan atau dukungan kemudian diartikulasi kepada pihak suprastruktur agar dapat dijadikan sebuah keputusan. Setelah infrastruktur menyampaikan kepentingannya, maka sudah menjadi tugas suprastruktur untuk memproses input tersebut dalam sebuah lembaga tertentu, tempat untuk memproses input ini biasa juga dikenal dengan *black box*, karena tidak semua pihak yang dapat mengetahui dan ikut terlibat didalamnya. Apalagi biasanya tidak semua artikulasi kepentingan akan diproses oleh suprastruktur. Bahkan, dalam banyak kasus, bisa saja suprastruktur tidak memproses sama sekali tuntutan yang disampaikan oleh infrastruktur.

Proses yang dilakukan oleh suprastruktur dalam *blackbox* itu kemudian dikenal dan konversi (*conversion*). Proses konversi ini biasanya dikenal juga dengan proses perubahan dari input menjadi output. Dalam proses konversi ini terjadilah suatu fenomena politik dalam suatu pemerintahan yang sering disebut sebagai proses degradasi kepentingan, yaitu proses memilah-milah kepentingan yang berasal dari tuntutan atau dukungan infrastruktur menjadi pola kebijakan umum yang pada akhirnya akan menjadi output berupa keputusan atau kebijakan-kebijakan. Pada beberapa negara yang berusaha mengembangkan demokrasi, biasanya antara tuntutan dan dukungan tidak jauh berbeda. Meskipun tidak semua keputusan sesuai dengan

tuntutan yang diinginkan, namun sering mendekati keinginan yang dibentuk oleh masyarakat atau infrastruktur.

Oleh karenanya, keseimbangan antara tuntutan dan keputusan biasanya sangat tergantung dari political will dan juga kemampuan suprastruktur dalam memproses kepentingan-kepentingan yang disampaikan oleh infrastruktur. Disini pula akan diketahui responsibilitas sebuah sistem politik. Yang sering terjadi pada sistem politik adalah apabila suprastruktur atau pemerintah kurang memperhatikan tuntutan dari masyarakatnya. Bisa juga yang terjadi adalah ketidakmampuan aparat pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat.

Oleh karenanya, keputusan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya ketersumbatan keinginan masyarakat. Sebuah sistem politik yang dapat merespon tuntutan dari infrastruktur merupakan sistem politik yang sangat didambakan oleh banyak orang. Untuk menuju kearah keadaan yang baik itu, diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan juga keinginan baik dari aparat pemerintah yang berada dalam suprastruktur.

Sampai pada keadaan bagaimanapun, apakah suprastruktur responsif atau tidak terhadap keinginan infrastruktur, proses dalam sistem politik harus mengikutui dan menaati semua keputusan yang ditetapkan. Bahkan, sebuah sistem politik juga memiliki alat pemaksa untuk menerapkan keputusannya.

Meskipun keputusan sistem politik bersifat otoritatif, namun keputusan itu masih tetap dapat dipertimbangkan oleh infrastruktur. Dalam hal ini, infrastruktur masih dapat memberikan respon terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Sikap

infrastruktur kemudian menjadi tuntutan dan atau dukungan bagi suprastruktur untuk menerapkan atau merubah keputusan yang telah dikeluarkan. Selain itu, tuntutan dan atau dukungan dari masyarakat itu kemudian juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menetapkan keputusan yang akan datang. Dalam tingkat itulah dikenal adanya umpan balik (*feedback*) pada sebuah sistem politik.

Sebagai contoh, dengan kedatangan para imigran gelap ke Australia yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, ternyata membuat masyarakat Australia resah. Mengetahui masalah ini pemerintahan Australia yang dipimpin oleh John Howard segera membuat kebijakan dengan menolak tegas kedatangan para pengungsi ini dan membuat kebijakan dengan mengirim para imigran ke Selandia Baru, Nauru dan Papua Nugini. Selain itu John Howard membuat Undang-Undang Pencegahan Penyeludupan Manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan pemerintahan Howard sangat didukung oleh masyarakat Australia, karena kaum buruh atau pekerja Australia merasa tersaingi oleh para pekerja dari negara-negara Asia (para imigran) yang datang ke Australia dan mengambil pekerjaan mereka yang upahnya lebih murah. Otomatis apabila gaji yang diminta para imigran lebih sedikit, maka perusahaan akan lebih memilih mempekerjakan para imigran gelap tersebut. Dan para buruh Australia sendiri lambat laun akan kehilangan pekerjaan.

Dalam kasus lain mengenai kebijakan luar negeri Howard tentang dukungan Australia dalam perang Irak, pihak oposisi dalam hal ini Partai buruh yang mewakilkan penolakannya melalui kabinet bayangan di parlemen. Pemimpin Partai Buruh, Latham menilai bahwa kebijakan Howard tersebut merupakan suatu

kelemahan yang dapat diangkat dalam agenda kampanye Partai Buruh tahun 2004. Dalam permasalahan ekonomi, Partai Liberal dinilai berhasil mengurangi suku bunga yang tinggi yang merupakan warisan dari pemerintahan Partai Buruh sebelumnya.

F. HIPOTESA

Berdasarkan permasalahan yang muncul, dan dengan menggunakan aplikasi teori dari David Easton tentang analisis politik, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sementara yang menyebabkan Partai Liberal mampu mempertahankan posisi pemerintahan dan memperoleh dukungan mayoritas masyarakat Australia terbukti dengan kemenangan Partai Liberal kembali pada Pemilu 2004 dan John Howard kembali memimpin Australia. Faktor-faktor yang membawa Partai Liberal memenangkan Pemilu 2004 antara lain:

1. Kebijakan Partai Liberal selama jalannya pemerintahan Australia lebih mendapatkan dukungan di mata Masyarakat Australia
2. Keberadaan Partai Buruh dengan kritiknya kurang memberikan perlawanan yang berarti.

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik Library Research atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah, majalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab dan sistematikanya diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, ruang lingkup permasalahan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI

A. Kebijakan Partai Liberal

- 1. Pajak dan sector usaha kecil**
- 2. Kebijakan ekonomi luar negeri**

B. Kebijakan ekonomi Partai Buruh

- 1. Pajak dan sector usaha kecil**
- 2. Kebijakan ekonomi luar negeri**

BAB III : PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

A. Kebijakan Partai Liberal

- 1. Keamanan Nasional**
- 2. Kebijakan mengenai pengiriman pasukan ke Irak**

B. Kebijakan Partai Buruh

1. Keamanan Nasional
2. Pandangan Partai Buruh terhadap pengiriman pasukan ke Irak

BAB IV : KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Kebijakan Partai Liberal

1. Inovasi dalam bidang kesehatan
2. Kebijakan mengenai pendidikan

B. Kebijakan Partai Buruh

1. Jaminan kesehatan sebagai program utama
2. Kebijakan mengenai pendidikan

BAB V : KESIMPULAN